

Multikulturalisme (Toleransi Dalam Pandangan Masyarakat Tionghoa Kota Makassar)

¹Anggriani Alamsyah, ²Burhanuddin Yusuf

^{1,2} Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

E-mail: anggriani.alamsyah@uin-alauddin.ac.id

Abstract

This paper focus on understanding the tolerance that exists in our Chinese ethnic relatives, especially those in Makassar City, which aims to find out the forms of tolerance of the Chinese Ethnic Makassar City. This paper uses a qualitative design approach, where data is obtained from interviews, observations and documents. The Ethnic Chinese view of tolerance is represented in terms of cognitive, affective, and conative.

Keywords: Chinese Ethnic; Makassar City; Tolerance

Abstrak

Tulisan ini memfokuskan diri pada pemahaman toleransi yang ada pada saudara-saudara kita Etnis Tionghoa, khususnya yang ada di Kota Makassar, yang bertujuan untuk mengetahui bentuk toleransi Etnis Tionghoa Kota Makassar. Tulisan ini menggunakan desain pendekatan kualitatif, di mana datanya diperoleh dari wawancara, observasi dan dokumen. Pandangan Etnis Tionghoa mengenai toleransi tergambar dari sisi kognitif, afektif, dan konatif.

Kata Kunci: Etnis Tionghoa; Kota Makassar; Toleransi

Pendahuluan

Multicultural pada hakikatnya berasal dari dua kata yakni multi dan cultural. Secara bebas multi berarti banyak dan kultural diartikan budaya, banyak budaya, bisa diartikan kumpulan orang-orang dengan budaya yang berbeda, yang hidup dalam suatu wilayah tertentu. Keragaman menjadi ciri utama multikulturalisme, keragaman bisa diartikan jenis kelamin, suku, agama, budaya, kemampuan fisik, tempat lahir dan lain-lain.

Amerika Serikat adalah salah satu bentuk multikultural yang paling nyata, negara ini walaupun punya penduduk asli, namun kenyataannya negara tersebut menjadi negara adidaya bukan semata atas upaya penduduk aslinya, sebaliknya oleh para pendatang yang telah beranak pinak dan membangun negara tersebut. Para pendatang ini tidak semata datang dari Inggris Raya, tetapi juga wilayah dunia lainnya baik dari Eropa, Afrika maupun Asia. Pertanyaannya sekarang adalah apa yang membentuk

Amerika? Bagi banyak orang yang tinggal di Amerika Serikat, yang muncul dalam pikiran untuk memvisualisasikan seperti apa orang Amerika, adalah tipe Eropa Utara, blonde dan bermata biru. Mereka yang secara visual berbeda dari apa yang dianggap orang Amerika, mengalami penolakan. Banyak dari mereka tidak dianggap orang Amerika karena warna kulit mereka.¹

Eduardo Seda Bonilla dalam Rosado menyatakan bahwa: Selalu ada “dua cara” adaptasi bagi kelompok minoritas di Amerika Serikat. Cara pertama didesain bagi etnik atau “budaya” minoritas, imigran dari negara yang berbeda. Cara lainnya adalah minoritas “rasial”. Untuk yang pertama – Irlandia, Jerman, Italia, Yahudi, dan lain-lain. – semua semata-mata harus berasimilasi dan diterima untuk mengubah identifikasi etnik mereka, mengesampingkan budaya mereka. Sekali identitas budaya mereka terpinggirkan di bawah identitas budaya Amerika, yang intinya adalah Inggris, pintu “kediaman” atau dunia tidak terlihat secara sosial dari kaum mayoritas, terbuka lebar; karena mereka “putih.” Bagi kelompok minoritas tipe kedua, diidentifikasi berdasarkan stigma “rasial”, isunya lebih kompleks, biologis dan sebagai hasilnya penumpahan budaya tidak membuat perbedaan dalam penerimaan mereka. Mereka tidak pernah terlihat, tidak juga tidak dianggap orang Amerika “asli”, hanya ditulis dengan tanda penghubung Amerika: Amerika-Asli, Africa-Amerika, Hispanik-Amerika, Asia – Amerika dan lain-lain. Implikasinya adalah mereka belum terlalu Amerika, tidak juga akan menjadi orang Amerika karena perbedaan fenotif tadi.²

Akan halnya Indonesia mempunyai penduduk sebesar 262 juta jiwa, enam agama yang diakui negara, pada 35 provinsi menempati 2.342 pulau dari 17.504 pulau yang dimiliki Indonesia. Indonesia memiliki 1.340 suku bangsa menurut sensus BPS tahun 2010. Jumlah suku bangsa yang sangat banyak ini di satu sisi menguntungkan, tetapi di pihak lain bisa menjadi hal yang merugikan. Menguntungkan karena keragaman etnik adalah kekayaan bangsa yang tidak ternilai harganya, apalagi bila keragaman etnik dan budaya tersebut bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan bidang pariwisata negara kita. Sisi merugikannya adalah keragaman etnik dan agama maka kerawanan akan terjadinya pergesekan juga semakin besar.

Salah satu inti dari paham *multicultural* adalah pengakuan dan perlakuan yang sama terhadap semua etnik, agama, jenis kelamin dalam semua negara. Pengakuan dan perlakuan yang sama bukanlah hal yang mudah, karena pengukurannya bisa sangat subyektif. Jika rasa ketidakpuasan akan pengakuan dan perlakuan yang sama dimanfaatkan oleh pihak-pihak

¹ Caleb Rosado, “Toward a Definition of Multiculturalism,” *Retrieved From*, 1996, 7.

² Rosado, 7.

tertentu untuk keuntungan mereka, maka perpecahanlah yang akan terejawantah. Masih segar dalam ingatan kita bagaimana isu etnik dan agama “dimanfaatkan” untuk kepentingan politik. Dimana Ahok (Mantan Gubernur Jakarta yang juga petahana yang mencalonkan diri kembali pada Pilgub Jakarta 2017) yang notabene adalah keturunan Tionghoa dan seorang Nasrani dipenjara karena dianggap melecehkan Agama Islam. Ahok merupakan keturunan kesekian dari nenek moyangnya yang berasal dari Tiongkok.

Orang Tionghoa telah ada di Indonesia bahkan jauh sebelum Indonesia merdeka, mereka pun banyak memberikan sumbangsih bagi kemenangan dan kemajuan bangsa Indonesia. Pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia orang Tionghoa yang berkewarganegaraan Indonesia digolongkan sebagai salah satu suku dalam lingkup nasional Indonesia. Paham multicultural nyatanya telah meresap dalam nilai-nilai kebangsaan kita baik secara formal maupun non formal.

Etnis Tionghoa yang ada di Indonesia, meskipun telah melakukan asimilasi budaya dengan budaya asli Indonesia, mereka tetap memelihara budaya dari negeri asal mereka. Selain asimilasi budaya, agama yang mereka anut pun juga beragam, menganut agama-agama yang diakui oleh Pemerintah Indonesia. Meskipun begitu, bagi mayoritas penduduk Indonesia, Etnis Tionghoa tetap dianggap berada pada “kelas sosial tertentu” dikarenakan kemampuan dan keterampilan mereka dalam perdagangan. Kelebihan mereka dalam bidang ekonomi, tidak sedikit menimbulkan kecurigaaan bahkan kecemburuan bagi warga negara lainnya. Jika ini “disulut” maka bukan hal yang tidak mungkin akan banyak memakan korban, yang sebenarnya juga sesama warga negara Indonesia. Namun yang lebih disayangkan jika perpecahan ini ditunggangi oleh kepentingan politik semata, yang bertujuan memuaskan nafsu kekuasaan dengan cara-cara tidak terpuji.

Sebuah artikel membahas jauh lebih detil daripada sekadar multikulturalisme, artikel ini menggambarkan bagaimana multikulturalisme memengaruhi agama dan agama perubahan budaya di komunitas Muslim di Swedia dan Norwegia, khususnya dengan referensi ke gender dan hubungan gender. Meskipun kedua masyarakat memiliki beberapa kebijakan multikultural, wacana tentang multikulturalisme masih menyebabkan klaim untuk pluralisme hukum. Namun, tampaknya ada perubahan yang nyata dari

sikap seperti klaim antara imigran Muslim generasi pertama dan mereka keturunan, generasi kedua Norwegia dan Swedia Muslim.³

Artikel lain oleh Chuka Umunna MP dalam *Opinium Research* berjudul “*Rebuilding Our Divided Nation*” menemukan bahwa Inggris Raya yang selama ini menghormati dan mempertahankan keragamannya, belakangan ini terlihat terpecah sejak terjadinya referendum yang mengharuskan warga Negara Inggris Raya untuk tetap atau keluar dari Uni Eropa. Hasilnya referendum tersebut adalah keluar dari Inggris Raya, meskipun sebenarnya tidak sedikit yang menginginkan agar Negara mereka tetap menyatu dalam Uni Eropa. Temuan ini mengindikasikan bahwa kaum minoritas di Inggris Raya menganggap Negara tersebut kurang pantas menjadi tempat untuk mencari kehidupan, hal ini dibuktikan dengan banyaknya insiden-insiden yang berbasis rasisme, belum lagi di media sosial dan internet.⁴

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan telah memberikan pengakuan atas enam agama yang bisa hidup dan berkembang di Indonesia, dan baru-baru ini pengakuan terhadap aliran kepercayaan telah mulai berlaku, dimana penganut aliran kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa memiliki kedudukan hukum yang sama dengan pemeluk enam agama lainnya, dalam memperoleh hal terkait administrasi kependudukan. Toleransi beragam sebenarnya telah tercermin dalam dasar Negara kita yakni Pancasila yang mencetuskan bahwa manusia Indonesia yang ber-Ketuhanan Yang Maha Esa, artinya siapapun dia, apapun latar belakangnya, selama dia mengakui keberadaan Tuhan Yang Maha Esa, maka dia berhak hidup dan mencari kehidupan di bumi Indonesia, termasuk tentu saja saudara-saudara kita Etnis Tionghoa.

Adapun pembeda utama pada penulisan ini adalah, fokus penulis mengarah pada pemahaman tentang bentuk toleransi beragama Etnis Tionghoa di Kota Makassar.

Pemahaman tentang toleransi tidak semata kewajiban etnis, agama, atau suku tertentu, namun kewajiban seluruh warga Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penulisan ini ingin memfokuskan diri pada pemahaman toleransi yang ada pada saudara-saudara kita Etnis Tionghoa, khususnya yang ada di Kota Makassar. Penulis ingin mengetahui Bentuk Toleransi Beragama Etnis Tionghoa Kota Makassar, yang datanya diperoleh dari

³ Anne Sofie Roald, “The Discourse of Multiculturalism: An Obstacle to Cultural Change?,” *Tidsskrift for Islamforskning*; 18 (2014): 248.

⁴ Chuka Umunna Mp, “REBUILDING OUR DIVIDED NATION,” *Opinium Research*, 2017, 20.

wawancara dengan beberapa tokoh Tionghoa Kota Makassar, observasi serta dokumen pendukungnya. Karena tulisan ini bertujuan menggambarkan bentuk toleransi Etnis Tionghoa di Kota Makassar, maka toleransi itu digambarkan dari tiga dimensi yakni kognitif, afektif dan konatif, toleransi yang berada pada aras pemahaman, sikap dan perilaku.

Metode

Paper ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan datanya dilakukan dengan cara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif dan hasil penulisan lebih menekankan dari generalisasi.⁵ Metode ini digunakan dalam melihat fenomena yang terjadi di lapangan yang menyangkut toleransi oleh Etnik Tionghoa, terutama toleransi beragama. Penelitian ini berlokasi di Kota Makassar, selain sebagai ibukota Provinsi Sulawesi Selatan, Kota Makassar dengan penduduk Etnis Tionghoa yang cukup besar jauh sebelum Indonesia Merdeka.

Penulis mewawancarai beberapa warga Tionghoa dari berbagai agama yang dianut mereka, untuk mendapatkan gambaran yang lebih menyeluruh tentang pemahaman dan implementasi toleransi beragama.

Hasil dan Diskusi

Reformasi demokrasi secara nasional telah membuka ruang bagi warga keturunan Tionghoa untuk ikut berbaur serta berpartisipasi dalam kehidupan sosial politiknya. Meski dari segi kehidupan sosial terjadi beberapa kerusuhan yang melibatkan etnis Tionghoa yaitu, (1) Peristiwa G30S pada tahun 1965 terjadi, maka kenangan kerukunan dan kedamaian menjadi hilang. Mereka seakan kembali dari zaman kegelapan, mereka menggunakan lagi prinsip jaman jahiliah *sikanre jukuki tauwwa* (manusia bagaikan binatang yang saling memangsa). Orang-orang dari etnis Tionghoa diganyang, dilempari, dibunuh, diteror, dan dibakar karena hal-hal yang bersifat sepele.

Pada tahun 1965, orang-orang dari etnis Tionghoa diganyang karena kampanye-kampanye sadis pemerintahan Orde Baru yang memberikan pernyataan bahwa orang-orang Tionghoa itu identik dengan Partai Komunis Indonesia (PKI). Sejak saat itu pemerintah melegalkan suatu budaya amuk atau pengganyangan serta mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang mengebiri hak-hak etnis Tionghoa. Letupan kedua terjadi pada tahun 1980.

⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2008), 11.

Tahun 1996 Etnis Tionghoa kembali diganyang, disebabkan karena seorang Laki-laki yang kebetulan berasal dari etnis Tionghoa menghamili pembantunya, seorang gadis dari Toraja, gadis ini kemudian meminta pertanggungjawaban dari tuannya, ia ingin dinikahi. Tapi tuannya ini salah satu pemilik tokoh LA, toko yang terbesar di Makassar waktu itu, malah membunuh dengan sadis pembantunya tersebut. Akibatnya warga pribumi mengamuk mengganyang etnis Tionghoa, ribuan bangunan ludes dilalap api, ratusan kendaraan bermotor pun demikian dan puluhan nyawa melayang, dan Pada tahun 1997 dipenghujung Orde Baru, orang-orang dari Etnis Tionghoa kembali diganyang, penyebabnya karena seorang yang kelainan jiwa yang kebetulan beretnis Tionghoa, dengan kalap menebas seorang anak kecil yang berumur 9 tahun sampai mati. Akibatnya Makassar kembali lumpuh dan menelan banyak korban. Meskipun di Makassar beberapa tahun terakhir ini tidak terjadi konflik yang besar seperti sebelumnya dalam kehidupan bermasyarakat. Namun satu hal penting yang tidak bisa dipungkiri adalah masyarakat etnis tionghoa merupakan etnis yang minoritas yang selalu berada dalam posisi dilematis yang sewaktu-waktu dapat terancam bila terjadi kerusuhan sosial maupun kerusuhan politik.⁶

Etnis Tionghoa di Kota Makassar dengan segala kisah suka dukanya, sejatinya adalah Warga Negara Indonesia juga, mereka punya hak untuk hidup dan berpenghidupan di negeri ini. Dalam bernegara kita sudah punya aturan sendiri tentang toleransi, namun bagaimana pemahaman toleransi dalam pandangan Etnis Tionghoa, akan kita lihat dari sisi kognitif, afektif dan konatif.

1. Kognitif

Dalam Piagam PBB tentang Deklarasi Universal of Human Rights 1948, meliputi: Hak berpikir dan mengeluarkan pendapat, Hak memilih sesuatu, Hak mendapatkan pendidikan dan pengajaran, Hak menganut aliran kepercayaan dan agama, Hak untuk hidup, Hak untuk memperoleh nama baik, Hak untuk memperoleh pekerjaan, Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum.

Ditinjau dari berbagai bidang, HAM meliputi : a) Hak azasi pribadi (*Personal Rights*), contoh: hak kemerdekaan, hak menyatakan pendapat, hak memeluk agama; b) Hak azasi politik (*Political Rights*), contoh: memilih dan dipilih, hak berserikat dan berkumpul, hak berkumpul; c) Hak azasi ekonomi (*Property Rights*), contoh: hak memiliki sesuatu, hak mengarahkan perjanjian, hak bekerja dan hak mendapat hidup layak; d) Hak azasi sosial

⁶ Ety Gustin Merdeka Waty, "Orientasi Politik Etnis Tionghoa Di Kota Makassar" (Makassar, Universitas Hasanuddin, 2016), 62-69.

dan kebudayaan (*Sosial and Cultural Rights*), contoh: hak mendapatkan pendidikan, hak mendapatkan santunan, hak pensiun, hak mengembangkan kebudayaan dan hak berekspresi; e) Hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan (*Rights of Legal Equality*).

Dari uraian di atas nampak jelas bahwa hak beragama merupakan hak dimiliki oleh setiap orang sejak lahir, yang melekat padanya sebagai seorang manusia. Hak ini tidak dapat dicabut atau diganggu gugat oleh siapapun bahkan oleh negara sekalipun. Meskipun demikian Indonesia punya pandangan sendiri tentang hak beragama, jika di beberapa negara, semisal di Jerman dan Korea Selatan, orang boleh tidak beragama, maka di Indonesia hanya enam agama yang diakui, dan setiap warga negara harus menganut salah satu dari enam agama yang diakui negara. Tidak satupun warga negara Indonesia yang diijinkan untuk tidak memiliki agama, terlepas dari apakah ia menjalankan ajaran agamanya dengan taat atau tidak.

Salah satu ciri negara modern adalah sadar akan batas kekuasaan dan hak-haknya. Negara menganggap dirinya secara esensial adalah komunitas legal dan politik. Negara menyerahkan klaimnya untuk mendominasi agama dan ibadah dan meninggalkan keduanya ke gereja dan individu. Di Indonesia hal-hal yang menyangkut ibadah dan syariah diserahkan kepada agama yang bersangkutan. Namun, selebihnya menjadi urusan negara, semisal penanganan haji dan umroh sebagian besar ditangani oleh negara, karena ini menyangkut hak hidup orang banyak. Demikian pula menyangkut pendidikan, komunitas agama boleh mendirikan sekolah yang berbasis agama, namun kurikulumnya harus mengacu kepada kurikulum yang telah ditetapkan oleh negara. Hal lainnya menyangkut organisasi agama, jika di negara Jerman misalnya, organisasi agama boleh punya azas apapun, namun di Indonesia, setiap organisasi termasuk organisasi agama, harus berazaskan Pancasila.

Indonesia adalah negara multikultural, beragam suku, budaya, agama, bahasa, dan kebiasaan didalamnya. Pulau-pulaunya yang terbentang dari Sabang sampai Merauke, Miangas sampai Pulau Rotte, merawat budaya yang dikandungnya. Multikulturalisme setidaknya dapat dipahami dari tiga perspektif;⁷ a) Multikulturalisme sebagai ideologi; b) Multikulturalisme sebagai isu sosial; c) Studi akademik multikulturalisme. Jika melihat ciri dan pengertian dari ketiganya, maka dapat dikatakan bahwa Indonesia memandang multikulturalisme sebagai ideologi. Hal ini dibuktikan dengan tulisan yang berada di kaki Burung Garuda “Bhinneka Tunggal Ika”, berbeda-

⁷ Malory Nye, “The Challenges of Multiculturalism,” *Culture and Religion* 8, no. 2 (July 1, 2007): 111–13, <https://doi.org/10.1080/14755610701458915>.

beda tetapi satu jua. Multikulturalisme sebagai ideologi dipandang sebagai sebuah upaya untuk menciptakan (memaksakan) serangkaian hubungan sosial antar kelompok-kelompok tertentu, seringkali bertujuan untuk membangun tingkat persamaan sosial dan keadilan sosial.

Perbedaan nampaknya mempunyai sisi positifnya sendiri, karena keanekaragaman sesungguhnya adalah kekayaan sebuah negara. Namun, perbedaan juga sangat berisiko tinggi untuk terpecah belah. Siapa yang pernah menyangka negara sebesar Uni Soviet akan terpecah-pecah menjadi negara-negara kecil, demikian pula Yugoslavia yang juga terberai menjadi beberapa negara, didahului dengan peristiwa mengenaskan karena ada upaya penghancuran etnis Bosnia oleh Etnis Serbia, perang saudara tak dapat dihindari. Perang ini sering dianggap perang paling mematikan setelah Perang Dunia II. Pemimpin ekstrimis garis keras Serbia, Slobodan Milosevic, ditetapkan sebagai penjahat perang atas kelakuannya dan akhirnya meninggal di sel tahanannya pada tahun 2006.

Seperti diceritakan sejarah, penghancuran etnis yang dilakukan pihak Serbia kepada etnis Bosnia yang mayoritas muslim. Mereka membunuh para lelaki dan memperkosa perempuan-perempuan dengan tujuan tidak ada lagi etnis Bosnia yang murni/orisinal. Tergambar jelas bahwa keragaman etnis, jika tidak pandai-pandai dipelihara maka akan menjadi pemicu yang empuk untuk bercerai berai. Konflik-konflik horizontal biasanya terjadi jika satu etnis 'terlihat' lebih dominan dari lainnya. Isu agama, ekonomi merupakan 'bahan mentah' sebuah konflik horizontal.

Informan Penulisan umumnya menyadari bahwa Indonesia adalah negara yang multikultural, yang majemuk yang harus dijaga keutuhannya. Mereka menyadari bahwa Indonesia adalah negara yang majemuk dan warga negara bebas memilih agama, selama agama tersebut memang diakui oleh negara. Hal ini tertuang dalam wawancara Penulis dengan Bapak Ir. Hans Hartono (Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia):

“Indonesia adalah negara kesatuan dan gugusan kepulauan seluruh penjuru yang dulu bernama dari sabang sampai marauke, begitupun indonesia adalah negara yang majemuk yang harus dijaga keutuhannya.”

Demikian halnya yang dikatakan oleh Karl Howard Lalamentik SH., M.Km: Indonesia adalah negara yang terdiri dari banyak suku, ras dan agama, dan dikenal sebagai negara yang toleransinya tinggi dari segi teori.

Menurut Steven M. Chaffe menguraikan bahwa respon kognitif berkaitan dengan pengetahuan, keterampilan, dan informasi seseorang mengenai sesuatu. Dari wawancara di atas, nampak bahwa saudara kita dari Etnis Tionghoa telah paham bahwa Indonesia adalah sebuah negara

majemuk dengan beragam suku bangsa dan agama. Namun, mereka juga sadar bahwa Indonesia adalah tanah kelahiran mereka, di mana mereka hidup dan berkehidupan di dalamnya. Indonesia adalah negara yang berdaulat dan menganut azas demokrasi. Meskipun dalam kehidupan bangsa yang majemuk, persinggungan antar etnis kadang tidak dapat dihindari.

Beberapa tahun yang lalu di Kota Makassar, ketika seorang anak dosen di sebuah universitas Islam ternama, dibunuh oleh oknum Etnis Tionghoa yang sebenarnya 'kurang normal'. Hal ini memicu konflik yang sangat dramatis, sehingga banyak menimbulkan kerugian di kalangan etnis Tionghoa.

Di bawah ini tulisan seorang warga Etnis Tionghoa dalam blognya⁸ mengenai kerusuhan tersebut:

Pemicunya adalah Benny yang terkenal temperamen sering mengancam-ancam golok kepada pribumi yang tidak dia senangi. Tanggal 15 September 1997, dia keluar rumah membawa pedang sambil mengancam seorang pedagang tahu. Pedagang itu kemudian dikejanya. Tepat di taman Air Mancur Veteran Selatan, dia mengancam siapa saja yang melintas. Dan nasib malang menimpa seorang bocah perempuan berusia 9 tahun. Anni ditebas hingga tewas oleh Benny. Benny yang terkenal temperamen itu kemudian pulang setelah membunuh Anny.

Namun, warga sadar diri, sehingga walaupun ketika itu mengganggu Cina dikala itu sama saja bunuh diri. Itu disebabkan saking dekatnya warga Cina yang kaya raya dengan aparat kepolisian. Namun kasus pembacokan itu menyebar malam itu juga. Berita berhembus sampai ke Gowa, pusat suku Makassar. Kasus pembacokan juga bocor lewat radio hingga ke Maros. Tersentuhlah sentimen kesukuan pribumi.

Apalagi pembacokan tidak ada tindakan hukum oleh aparat. Malam itu juga sekitar pukul 00.00, massa pribumi merangsek ke Jl. Kumala. Benny rupanya punya juga rekan-rekan Cina yang merupakan geng Cina di Veteran Selatan. Namun apa daya, massa pribumi lebih besar. Malam itu Benny terbunuh, 500 orang lebih warga Cina geng Benny terluka. Jutaan massa mulai melakukan perusakan rumah-rumah dan toko-toko warga keturunan di Jalan Kumala, Ratulangi, dan sekitarnya. Massa kemudian bergerak ke Jalan Veteran, Penghibur, Nusantara, Timor, Sulawesi, Ahmad Yani dan Jalan Wahidin Sudirohusodo sambil melakukan pengrusakan, pelemparan dan

⁸ Unknown, "Hot News 2017: Tragedi Kerusuhan Makasar 1997 Disebabkan 1 Orang Etnis Cina," *Hot News 2017* (blog), Minggu, Mei 2017, <http://berita86hot.blogspot.com/2017/05/tragedi-kerusuhan-makasar-1997.html>.

pembakaran terhadap kendaraan dan rumah penduduk Cina. Hampir seluruh rumah penduduk Cina habis terbakar.

Aparat yang menjaga rumah-rumah dan pusat pertokoan Cina tidak luput dari amuk massa. Mereka juga ikut diserang karena dianggap ingin membela kelompok Cina. Malam itu Makassar menjadi lautan Api.

Keesokan harinya beredar selebaran bertuliskan lontara ; "Mana siri kita?, Mana Pabbulo Sibatangta?, Accera Sitongka-tongka?, Mana barambang bete-beteta?". Emosi warga semakin tersulut. Kerusuhan pun meletus selama 1 minggu. Polisi dan tentara tidak sanggup meredakan emosi massa.

Beberapa rumah yang takut dijarah dan dirusak memasang tulisan "milik pribumi" atau sajadah yang ditempel di kaca jendela menjadi pemandangan baru di sana. Bahkan, hotel milik Yusuf Kalla, bos Kalla Grup, memajang tulisan besar "Hotel Ini Milik Haji Kalla". Ada juga yang ini: "Hotel Ini Milik Tanri Abeng/Pemda". Adalagi sebuah tempat karaoke bertuliskan "Ini Milik Kodam".

Kodam 7 Wirabuana meminta tambahan pasukan dari Jakarta. Namun pasukan tambahan cuma bisa mencegah Matahari Departemen Store belaka menjadi sasaran amuk massa. Hari itu menjadi sangat panas, bantuan pasukan TNI dari Jawa justru memicu nyali warga Bugis Makassar untuk semakin amuk. Perintah tembak di tempat ditanggapi panas oleh warga. Warga menantang tentara, waktu itu beredar semboyan ; "1 orang Bugis Makassar ditembak, 4 tentara mati!". Ini semakin kisruh. Akhirnya pasukan ditarik ke Jl. Jenderal Sudirman saja mengamankan aset-aset pemerintahan.

Akhirnya waktu itu jalan terbaik meredakan masalah dan kerusuhan adalah lewat dialog. Warga Bugis Makassar adalah warga yang sebenarnya mudah diajak negosiasi. Bencana ini menyebabkan kerugian sebesar Rp 117, 5 milyar, 2000 rumah dan toko hancur, 80 mobil rusak, 150 sepeda motor ludes, lima orang tewas, 13 mahasiswa mengalami luka tembak. Kamis 18 September 1997, Pukul 08.00. Warga pribumi dan warga Cina berkumpul di Mapoltabes Ujungpandang. Sementara Panglima Kodam VII Wirabuana Mayor Jenderal Agum Gumelar dan Walikota Ujungpandang Malik B. Masry memberikan pengarahan di depan ratusan warga keturunan di Jalan Penghibur dan Jalan Sulawesi. Acara ini berlangsung di bawah penjagaan ketat.

Blogger tersebut mengakhiri tulisannya dengan pesan berikut "Catatan di atas semoga membawa manfaat terutama untuk kelompok minoritas (etnis Cina) di seluruh Indonesia agar pandai-pandailah membawa diri sebab sekalipun kalian dekat dengan aparat namun jika pribumi sudah hilang kesabaran maka yang tersisa pasti hanyalah penyesalan. Jadikanlah catatan ini sebagai renungan agar kalian disenangi oleh pribumi nusantara. Percayalah, pribumi itu orang yang beradab selama mereka tidak merasa

disakiti yakinlah malah merekalah yang akan melindungi kalian. Tapi sebaliknya jika kalian arogan, sombong itu sama saja kalian ingin bunuh diri.”

Beberapa hal yang menarik dari catatan di atas adalah:

a) Pemicu, setiap konflik, kecil atau besar tentu ada pemicunya. Konflik ini bisa dalam bentuk vertikal dan horizontal. Konflik yang terjadi di atas adalah konflik horizontal yang dipicu oleh sebuah pembunuhan. Selama ini terlihat bahwa Etnis Bugis Makassar dan Etnis Cina telah berbagi “peran” dan tempat. Etnis pribumi (walaupun istilah ini tidak sepenuhnya benar) kebanyakan bekerja di pemerintahan dan Etnis Tionghoa bergerak di bisnis. Meskipun demikian, banyak juga etnis Bugis Makassar yang memasuki dunia bisnis, yang biasanya hanya dilakukan oleh Etnis Tionghoa. Tapi sangat jarang terlihat Etnis Tionghoa yang menduduki jabatan-jabatan pemerintahan. Ahok adalah salah satu contohnya. Makassar termasuk wilayah di mana Etnis Cina dan Pribumi hidup dengan tentram, namun pembunuhan ini seperti membangkitkan “aroma persaingan” antara etnis-etnis tersebut yang selama ini tersimpan bagai api dalam sekam. Sedikit saja pemicunya, maka hal yang diceritakan di atas terjadi.

b) Kedekatan Etnis Tionghoa dengan aparat. Kedekatan Etnis Tionghoa dengan aparat sudah terjalin sejak lama. Salah satu yang bisa diidentifikasi adalah di masa pemerintahan Soeharto, di masanya Suharto mengandalkan saran dan dukungan dari sekelompok kecil orang kepercayaan di sekitarnya. Kelompok ini terdiri dari tiga kategori: (1) para teknokrat yang dilatih di Amerika Serikat (*USA-trained technocrats*), (2) para nasionalis ekonomi (yang mendukung gagasan peranan besar pemerintah dalam perekonomian) dan (3) para kroni kapitalis (yang terdiri dari anggota keluarga dan beberapa konglomerat etnis Cina kaya). Kadang-kadang, semua kategori tersebut dituduh korup namun sebagian besar penekanan mengarah ke lingkaran kecil kroni kapitalis (terutama anak-anak Suharto) yang merupakan penerima manfaat utama dari skema privatisasi negara - maka mereka tidak disukai oleh pengusaha nasional dan masyarakat - dan sering menjalankan monopoli bisnis besar yang beroperasi dengan sedikit pengawasan atau pemantauan.⁹ Soeharto adalah panglima tertinggi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI). Siapapun yang dekat dengan Soeharto, akan selalu mendapat dukungan dari ABRI. “Kedekatan” ini berlaku hampir di seluruh wilayah Republik Indonesia.

Tulisan di atas dibuat oleh warga Etnis Tionghoa yang paham betul akan prinsip-prinsip hidup Etnis Bugis Makassar: *Siri na pacce, abbulo*

⁹ “Investing in Indonesia | Indonesia Investments,” accessed Agustus 1, 2018, <https://www.indonesia-investments.com/>.

sibatang, accera sitongka-tongka, barambang bete-bete. Nilai-nilai *Siri' na Pacce* terdapat nilai-nilai etis meliputi teguh pendirian, setia, tahu diri, berkata jujur, merendah, sopan, cinta kepada ibu, empati. *A'bulu sibatang a'bannang kebo a'cera sitongka tongka* (musyawarah mufakat untuk menyatukan pendapat yang terbaik dan tidak bisa diingkari) *A'bulu sibatang a'bannang kebo a'cera sitongka tongka* (musyawarah mufakat untuk menyatukan pendapat yang terbaik dan tidak bisa dingkari). Sayangnya ketika peristiwa ini terjadi, kearifan lokal ini berubah menjadi semboyan: 1 orang Bugis Makassar ditembak, 4 tentara mati. Semboyan yang sangat bertentangan dengan nilai-nilai etis Bugis Makassar.

c) Negosiasi warga Etnis Cina dan warga Etnis Bugis Makassar. Salah satu bentuk penanganan konflik adalah melalui jalan kompromi, tentu saja ini tidak akan memuaskan semua pihak. Tiap kelompok dituntut untuk "mundur selangkah" dari apa yang diinginkannya. Kesepakatan akhirnya dicapai meskipun sebelumnya telah terjadi "kejadian luar biasa" yang telah "melukai" kebersamaan yang selama ini terbangun. Kedua pihak akhirnya menyadari kesalahannya dan sepakat untuk berdamai.

d) Hal yang menarik dari tulisan di atas adalah, penulis berusaha meyakinkan bahwa kedekatan dengan aparat tidak akan ada artinya jika mereka (Etnis Tionghoa) berada di pihak yang salah. Bahwa Etnis Tionghoa sadar bahwa Etnis Bugis Makassar adalah suku bangsa beradab, yang tidak akan menyakiti bila tak disakiti. Senegatif apapun sebuah konflik, bisa dipastikan ada sisi positifnya. Masing-masing pihak lebih berhati-hati dalam bersikap, berbicara, dan bertindak, yang dapat memicu konflik dikemudian hari, adalah salah satu sisi positifnya.

Kejadian di atas merupakan pelajaran toleransi yang besar, yang diterima oleh kedua pihak yang bersengketa. Realitas yang terbentuk dalam pikiran kita, sebelum, selama dan terjadinya konflik, membentuk citra dalam kepala kita. Akhir kata menyangkut bentuk kognitif toleransi bahwa masing-masing pihak punya dan tahu "gambaran toleransi" yang ada dalam kepala masing-masing. Diantaranya kesadaran akan Indonesia yang majemuk, dari Sabang sampai Merauke, Miangas Sampai Rotte. Namun kemajemukan itu harus dipahami sebagai suatu kekayaan, bukan bara api yang tersembunyi dalam sekam, yang sewaktu-waktu dapat "disulut" kembali.

Meskipun telah terjadi peristiwa yang sedemikian menyayat bagi kedua pihak, informan kami cenderung beranggapan bahwa Kota Makassar termasuk kota yang aman, sampai sekarang ini masih kondusif, bagus dan persaudaraan terhadap masyarakat masih kental walaupun beda suku, ujar bapak RR (Penggiat Kelenteng Budha). Bapak Pendeta HT (Majelis Agama Budha Theravada Indonesia) membenarkan hal ini, untuk beberapa tahun ini

termasuk aman, damai dan terkendali. Namun adapula yang berpendapat sebaliknya, menurut beliau Makassar itu kurang aman dikarenakan banyaknya kriminalisasi, banyak pelanggaran hukum dan penegakan hukum masih kurang.

Dari dua puluh informan yang kami wawancarai, hanya satu yang menganggap bahwa Makassar belum kondusif, meskipun demikian ini tidak bisa diabaikan, karena satu informan dapat saja mewakili banyak orang lainnya.

Hal terpenting sudah diperoleh dari Penulisan ini, yakni warga masyarakat telah tahu dan paham akan hak dan kewajiban mereka menyangkut bidang keagamaan. Pengetahuan dan pemahaman ini merupakan modal awal toleransi beragama.

2. Afektif

Politik dan agama adalah dua entitas yang berbeda, setidaknya itulah gambaran makro yang Penulis simpulkan ketika menanyakan pendapat informan menyangkut kandidat pemimpin yang “menjual” sentimen agama sebagai bahan kampanye.

Pada Kuliah Umum Prof. Franz Magnis Suseno di UGM Yogyakarta pada Senin 27 Agustus 2007,¹⁰ dijelaskan bahwa salah satu prinsip dasar etika politik kontemporer adalah pluralisme, yakni kesediaan untuk hidup secara positif, damai, toleran dan biasa / normal bersama warga negara masyarakat yang berbeda pandangan hidup, agama, budaya dan adat. Mengaplikan pengakuan terhadap kebebasan, beragama, berpikir, mencari informasi dan toleransi. Memerlukan kematangan kepribadian seseorang dan kelompok orang, yang terungkap dalam Ketuhanan Yang Maha Esa yang menyatakan bahwa di Indonesia tidak ada orang yang boleh didiskriminasikan karena keyakinan religiusnya. Sikap ini adalah bukti keberadaban dan kematangan karakter kolektif bangsa. Artinya setiap orang sama kedudukannya dalam pandangan negara, termasuk dalam bidang politik. Keagamaan seseorang tidak seharusnya dipelintir untuk kepentingan-kepentingan politik praktis.

Salah satu peristiwa yang paling mencolok mengenai hal ini adalah pada saat pemilihan Gubernur DKI Jakarta dimana salah satu calonnya adalah Basuki Tjahaya Purnama, seorang keturunan Etnis Tionghoa. Kasus ini mencuat dengan tema penistaan agama. Pada suatu kunjungan kerja Ahok di Pulau Seribu tepatnya di Pulau Pramuka, Ahok sempat melontarkan kalimat “jangan mau dibohongi pakai Al-Maidah 51”.

¹⁰ Anggriani Alamsyah, *Etika Politik* (UIN Alauddin University Press, 2013), 11.

Jika menilik sedikit ke belakang tentang Ahok, beliau adalah politikus partai dari Etnis Tionghoa yang berhasil menjadi anggota legislatif. Beberapa waktu kemudian, beliau mencalonkan diri sebagai Bupati Bangka Belitung dan berhasil memajukan wilayah tersebut. Akhirnya namanya semakin dikenal bersama dengan sifatnya yang tegas dan lugas jika ada bawahannya yang tidak menaati aturan yang berlaku. Ketika mencalonkan diri menjadi Gubernur Jakarta, Joko Widodo meminta Ahok untuk menjadi calon wakil gubernurnya. Meskipun keduanya bukan penduduk asli Jakarta, tapi karena mereka sudah membuktikan kinerjanya di daerah masing-masing, maka pemilih Jakarta yang umumnya adalah pemilih rasional, memenangkan pasangan Jokowi-Ahok untuk menjadi Gubernur - Wakil Gubernur DKI Jakarta periode 2012 - 2017. Ketika Jokowi terpilih sebagai Presiden RI maka otomatis Ahok naik menjadi Gubernur Jakarta dan dipilihlah Saiful Djarot sebagai wakilnya. Sifat Ahok yang tegas dan lugas, tidak pandang bulu membuat sebagian orang yang merasa terganggu "gerah", namun mereka belum mampu menampakkannya secara nyata. Barulah, ketika peristiwa 'Pulau Pramuka' pihak-pihak tersebut menampakkan dirinya.

Kejadian ini semakin menjadi 'gorengan' yang lezat karena settingannya adalah pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta. Pihak-pihak yang tidak senang pada Ahok mengkonstruksi peristiwa ini sedemikian rupa, sehingga menimbulkan sentimen agama yang berujung pada dipenjaranya Ahok dan terpilihnya Anies - Sandi sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta periode 2017 - 2022.

Beberapa informan kami menyatakan bahwa agama bukanlah 'dagangan' politik yang bisa diputar-putar sedemikian rupa sehingga akan menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lainnya. Nilai-nilai agama jauh lebih mulia daripada sekedar memenangkan kursi kekuasaan. Beberapa hasil wawancara kami menyatakan hal serupa:

"Bahwa itu terlalu ambisi untuk menduduki suatu jabatan tertentu, menghalalkan segala cara dan itu menyalahi nilai-nilai keagamaan"¹¹

Pendapat lainnya mengatakan bahwa itu tidak baik, sebenarnya agama tidak boleh dihubungkan dengan politik. Lain pula pernyataan bapak IY, seorang tokoh Budha yang menyorot tidak adanya hukum untuk melarang orang yang menjual agama untuk kepentingan politik. Menurutnya, menjual agama demi kepentingan politik itu merendahkan martabat agama.

Di jaman yang serba instan ini, realitas yang nampak bukan lagi realitas yang sebenarnya, realitas yang tersaji adalah hasil konstruksi pihak-pihak yang berkepentingan atas sebuah peristiwa. Mereka akan selalu

¹¹Wawancara dengan Bapak HH seorang tokoh Konghucu tanggal 15 September 2018.

membuat konstruksi demi konstruksi yang akan memberikan keuntungan bagi kelompok mereka. Konstruksi tidak selamanya buruk sepanjang dia menimbulkan keinginan untuk berbuat baik, misalnya upaya para ulama untuk meyakinkan umat Islam, bahwa jika mereka berbuat baik, maka ganjarannya kelak adalah surga.

Jalaluddin Rakhmat¹² menamakan realitas hasil konstruksi sebagai realitas tangan kedua (*second hand reality*), semisal televisi memilih tokoh-tokoh tertentu untuk ditampilkan dan mengesampingkan tokoh-tokoh yang lain. Ketika Amin Rais akhirnya datang ke Polda Metro Jaya setelah mangkir karena salah nama, menyatakan bahwa tidak ditematkannya kata Muhammad di depan namanya. Tanyanya apakah kepolisian alergi dengan nama Muhammad? Terlihat lagi konstruksi yang ingin dibentuk disini, Amien Rais nampak ingin membentuk opini dengan mengkonstruksi pertanyaan sedemikian rupa, demi menggambarkan bahwa kepolisian RI alergi dengan segala yang berbau Islam.

Di Indonesia, ibadah dan syariah sama sekali tidak dicampuri oleh negara, pelaksanaan haji dan umroh berada dalam pengaturan negara karena ini menyangkut hubungan dengan negara lain, namun ritual haji dan umrah diluar urusan negara. Kurikulum perguruan tinggi agama juga harus merujuk ke kurikulum pendidikan negara dan mengintegrasikannya dengan basis keagamaan masing-masing. Untuk hal-hal yang disebutkan di atas, warga negara sama sekali tidak berkeberatan, yang keliru adalah ketika sentimen-sentimen agama dimanfaatkan untuk memperoleh kekuasaan dan nikmat-nikmat duniawi lainnya.

Tiap-tiap tokoh agama hendaknya terus-menerus memperingatkan umatnya masing-masing, agar tidak mudah terpancing dengan konstruksi-konstruksi sosial negatif yang memakai agama sebagai dasar pijakannya.

Akan halnya ketika masalah toleransi berpindah ke pertanyaan sikap informan ketika ada kerabat dekat mereka yang pindah agama. Jawaban yang diperoleh nyaris mirip bahwa itu adalah hak tiap-tiap individu untuk memilih agama yang akan mereka yakini. Meskipun ada yang mungkin kecewa, tapi mereka tidak menghalanginya. Seorang penganut Budha bapak AW, mengatakan bahwa tidak apa-apa bahkan salah besar jika menghalanginya. Pernyataan serupa dilontarkan oleh bapak SG tokoh Muslim Tionghoa, silahkan saja asalkan bukan atas dasar paksaan, tetapi keinginan sendiri. Aktivistis Persatuan Islam Tionghoa Indonesia, bapak JA mempunyai pendapat

¹² Jalaluddin Rakhmad, *Psikologi Komunikasi* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000), 224.

yang berbeda akan hal ini, melarang pindah agama karena di dalam agama Islam orang tua diminta bertanggung jawabkan terhadap keluarganya.

Sikap tidak menghalangi keinginan orang lain, meskipun kerabat dekat, untuk berpindah agama, merupakan salah satu bentuk toleransi. Kalaupun ada yang tidak setuju dengan hal ini, itu sepenuhnya hak mereka. Toleransi beragama tidak berarti seseorang melihat agama orang lain sama benarnya, tetapi menjunjung tinggi hak orang lain untuk mempraktekkan keyakinan mereka.¹³ Agama merupakan wilayah privasi yang dilindungi undang-undang, UUD 1945 pada pasal 29 dengan jelas menyatakan bahwa (1) Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa; (2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Setiap warga negara memiliki agamanya dan kepercayaannya sendiri tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun. Tidak ada yang bisa melarang orang untuk memiliki cara dan proses ibadah yang bermacam-macam.

3. Konatif

Kejadian di tahun 1997 di atas, tidak membuat warga Etnis Tionghoa untuk melakukan eksodus, beramai-ramai meninggalkan Kota Makassar. Mereka lahir dan besar di Makassar, itu sudah membuat mereka selalu cinta pada Makassar, dan menjadi bagian dari Makassar. Selain karena mereka lahir di kota ini, kecintaan akan Kota Makassar didasari oleh rasa aman yang mereka peroleh dan tentu saja kuliner Kota Makassar yang nyaris tiada banding.

Karena kota ini adalah tempat mereka mencari hidup aka tentu mereka harus menjalin hubungan dengan Etnis-etnis dan penganut agama lain di Kota Makassar. Adalah kebiasaan di kota ini untuk mengadakan acara-acara keagamaan dengan mengundang penganut-penganut agama lain. Bukan untuk menghadiri ritualnya, tetapi silaturrahim setelah acara tersebut. Tidak jarang kita lihat sekelompok orang dari agama berbeda membantu agama lain untuk mempersiapkan keperluan ibadahnya, tetapi tentu tidak ikut ritualnya.

Beberapa waktu yang lalu ketika acara Natal disebuah gereja, maka sekelompok Muslim membantu pengamanan mereka, karena belakangan banyak terjadi perusakan ataupun teror ketika akan dilakukan misa natal. Hal nyata lainnya adalah Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral yang saling berseberangan, jika Shalat Jumat dilakukan dan parkirannya Masjid Istiqlal tidak

¹³ Ahmad Tarmizi Talib and Sarjit S. Gill, "Socio-Religious Tolerance: A Comparative Study Between Malaysia and Thailand," *Global Journal of Human Sosial Science* XII, no. VII (2012): 5.

muat, maka kendaraan dapat diparkir di Gereja Katedral. Jika pada hari Ahad parkir gereja penuh, maka kendaraan dapat diparkirkan di Masjid Istiqlal.

Pemerintah harus melakukan beragam usaha agar toleransi tetap terpelihara, karena menegakkan toleransi berarti memelihara stabilitas politik atau yang dinamakan eratianisme.¹⁴ Salah satu usaha itu adalah membuat organisasi yang dinamakan Forum Komunikasi Umat Beragama. Organisasi ini berada di bawah Badan Kesatuan Bangsa baik di tingkat provinsi dan kota/kabupaten. Organisasi ini berisi para pemuka-pemuka agama dan banyak melakukan kegiatan-kegiatan yang menyatukan umat-umat beragama. Jika umat-umat beragama sering berada dalam satu kegiatan yang sama, maka mereka akan lebih saling mengenal sehingga gesekan-gesekan akan semakin dikurangi.

Usaha-usaha semacam ini tidak hanya bersifat *top-down*, namun masyarakat juga melakukan beragam usaha untuk saling merekatkan diri antar etnis. Di Makassar ada China Town, setiap akhir pekan ada semacam festival kuliner di wilayah tersebut. Pembeli yang datang bukan hanya Etnis Tionghoa, karena makanan yang dijual ada makanan-makanan halal.

Salah satu bentuk asimilasi yang dilakukan oleh Etnis Tionghoa adalah sebagian besar mereka menyekolahkan anak-anaknya di sekolah umum. Hal ini dilakukan agar anak-anak mereka bisa 'menenal' dan akrab dengan anak-anak etnis yang berbeda.

Setelah pengakuan Konghucu menjadi agama yang diakui negara, maka budaya-budayanya pun dapat dijumpai lebih terbuka. Salah satunya adalah pertunjukan barongsai yang menjadi tontonan warga Kota Makassar setiap tahunnya. Setiap etnis yang ada di Makassar lebur menonton barongsai yang sedang beraksi.

Beberapa tahun belakangan ini, nampak jelas beberapa Etnis Tionghoa lebih "kelihatan" pada bidang yang tidak biasa mereka jalani, bukan aliran *mainstream* mereka. Misalnya ada Daniel Mananta yang awalnya seorang video jockey (VJ) MTV berada di dunia hiburan, namun akhirnya terjun ke bisnis. Sampai disini ceritanya biasa saja. Teristimewa dari bisnisnya adalah *tag line* yang selalu tertulis di setiap produknya "*Damn I Love Indonesia*". Produknya mulai dari sticker hingga t-shirt dan lainnya. Bisnis ini muncul dan tumbuh dikarenakan kecintaannya akan Indonesia, ide ini muncul ketika Daniel yang sedang berlibur ke Australia, tempat dia menimba ilmu, tetiba sangat rindu pada Indonesia. Setibanya di Indonesia, Daniel langsung mewujudkan rasa rindu tersebut menjadi bisnis yang sangat maju hingga hari ini. Intinya Etnis Tionghoa yang umumnya dianggap hanya "memeras"

¹⁴ Ahmad Tarmizi Talib and Gill, 5.

kekayaan Indonesia, bisa menunjukkan cintanya pada Indonesia, dengan cara yang tidak biasa.

Beberapa waktu belakangan ini juga muncul film-film yang menceritakan seorang tokoh yang selama ini telah menunjukkan kecintaan yang besar kepada bangsa Indonesia walaupun mereka adalah warga Etnis Tionghoa. Seperti *I Man Called Ahok*, *Merry Riana "Mimpi Sejuta Dollar"*, *Soe Hok Gie*, *Susi Susanti* adalah nama-nama tokoh yang telah memberikan hal-hal besar bagi Bangsa Indonesia.

Toleransi akan menghasilkan harmonisasi, toleransi yang baik berjalan secara alamiah. Pemerintah diharapkan menjadi fasilitator yang mendorong harmonisasi itu terjadi. Jika harmonisasi terjadi, maka akan tercipta suatu kondisi yang damai, yang memungkinkan pemerintahan bisa berjalan sesuai yang diharapkan.

Kesimpulan

Bentuk toleransi Etnis Tionghoa di Makassar dapat dikelompokkan ke dalam tiga bentuk: 1) Kognitif, Salah satu ciri negara modern adalah sadar akan batas kekuasaan dan hak-haknya. Negara menganggap dirinya secara esensial adalah komunitas legal dan politik. Negara menyerahkan klaimnya untuk mendominasi agama dan ibadah dan meninggalkan keduanya ke gereja dan individu. Di Indonesia hal-hal yang menyangkut ibadah dan syariah diserahkan kepada agama yang bersangkutan. Namun, selebihnya menjadi urusan negara, semisal penanganan haji dan umroh sebagian besar ditangani oleh negara, karena ini menyangkut hak hidup orang banyak. Demikian pula menyangkut pendidikan, komunitas agama boleh mendirikan sekolah yang berbasis agama, namun kurikulumnya harus mengacu kepada kurikulum yang telah ditetapkan oleh negara. Hal lainnya menyangkut organisasi agama, jika di negara Jerman misalnya, organisasi agama boleh punya azas apapun, namun di Indonesia, setiap organisasi termasuk organisasi agama, harus berazaskan Pancasila; 2) Afektif, Politik dan agama adalah dua entitas yang berbeda, setidaknya itulah gambaran makro yang Penulis simpulkan ketika menanyakan pendapat informan menyangkut kandidat pemimpin yang "menjual" sentimen agama sebagai bahan kampanye. Agama merupakan wilayah privasi yang dilindungi undang-undang, UUD 1945 pada pasal 29; 3) Konatif, Pemerintah harus melakukan beragam usaha agar toleransi tetap terpelihara, karena menegakkan toleransi berarti memelihara stabilitas politik atau yang dinamakan *eratianisme*. Salah satu usaha itu adalah membuat organisasi yang dinamakan Forum Komunikasi Umat Beragama. Organisasi ini berada

dibawah Badan Kesatuan Bangsa baik di tingkat provinsi dan kota/kabupaten. Organisasi ini berisi para pemuka-pemuka agama dan banyak melakukan kegiatan-kegiatan yang menyatukan umat-umat beragama. Jika umat-umat beragama sering berada dalam satu kegiatan yang sama, maka mereka akan lebih saling mengenal sehingga gesekan-gesekan akan semakin dikurangi. Usaha-usaha semacam ini tidak hanya bersifat *top-down*, namun masyarakat juga melakukan beragam usaha untuk saling merekatkan diri antar etnis. Di Makassar ada China Town, setiap akhir pekan ada semacam festival kuliner di wilayah tersebut. Pembeli yang datang bukan hanya Etnis Tionghoa, karena makanan yang dijual ada makanan-makanan halal. Salah satu bentuk asimilasi yang dilakukan oleh Etnis Tionghoa adalah sebagian besar mereka menyekolahkan anak-anaknya di sekolah umum. Hal ini dilakukan agar anak-anak mereka bisa 'menegal' dan akrab dengan anak-anak etnis yang berbeda.

Penulisan ini setidaknya memberikan implikasi pengetahuan, bahwa Etnis Tionghoa yang selama ini, bagi sebagian orang, mungkin nampak arogan, sebenarnya memiliki dan menghormati nilai-nilai toleransi yang memang telah ada dan dipelihara oleh Bangsa Indonesia. Multikulturalisme adalah kekayaan yang kita miliki. Toleransi hadir untuk memelihara kekayaan tersebut. Toleransi yang ditunjukkan oleh saudara kita Etnis Tionghoa menciptakan sinergi bagi kita warga Kota Makassar.

Daftar Pustaka

- Ahmad Tarmizi Talib, and Sarjit S. Gill. "Socio-Religious Tolerance: A Comparative Study Between Malaysia and Thailand." *Global Journal of Human Sosial Science* XII, no. VII (2012).
- Anggriani Alamsyah. *Etika Politik*. UIN Alauddin University Press, 2013.
- Ety Gustin Merdeka Waty. "Orientasi Politik Etnis Tionghoa Di Kota Makassar." Universitas Hasanuddin, 2016.
- "Investing in Indonesia | Indonesia Investments." Accessed April 22, 2020. <https://www.indonesia-investments.com/>.
- Jalaluddin Rakhmad. *Psikologi Komunikasi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000.
- Mp, Chuka Umunna. "REBUILDING OUR DIVIDED NATION." *Opinium Research*, 2017, 20.

Nye, Malory. "The Challenges of Multiculturalism." *Culture and Religion* 8, no. 2 (July 1, 2007): 109–23.
<https://doi.org/10.1080/14755610701458915>.

Roald, Anne Sofie. "The Discourse of Multiculturalism: An Obstacle to Cultural Change?" *Tidsskrift for Islamforskning*; 1 8 (2014).

Rosado, Caleb. "Toward a Definition of Multiculturalism." *Retrieved From*, 1996.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2008.

Unknown. "Hot News 2017: Tragedi Kerusuhan Makasar 1997 Disebabkan 1 Orang Etnis Cina." *Hot News 2017* (blog), Minggu, Mei 2017.
<http://berita86hot.blogspot.com/2017/05/tragedi-kerusuhan-makasar-1997.html>.

Wawancara dengan Bapak HH seorang tokoh Konghucu tanggal 15 September 2018.